

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga **Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2025** telah selesai disusun. Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2025, mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, yang dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar sebagai upaya mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan dimana semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan.

Penyusunan Renja merupakan kewajiban bagi setiap Perangkat Daerah. Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun disamping berfungsi sebagai pedoman kerja, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, dan strategi seluruh pegawai DPMPTSP Kabupaten Madiun dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia. Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2025 memuat penjabaran program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun tersebut.

Berhasil dan tidaknya pencapaian target yang telah ditentukan dalam Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Renja yang

telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025 untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Selain itu juga dapat berguna bagi peningkatan kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun.

Madiun, 20 Juni 2025


KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MADIUN
[Handwritten signature]
ARIK KRISDIANANTO, S.STP, M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750925 199602 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ...	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun.....	27
2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	31
2.3.1 Pelayanan DPMPTSP.....	31
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat DPMPTSP	32
2.3.3 Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional.....	33
2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan	34
2.3.5 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Proiritas Tahun 2024.....	36
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	36
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	50
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	51
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	51
3.2 Tujuan dan sasaran Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun.....	55
3.3 Program dan Kegiatan.....	55
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	58
BAB V PENUTUP.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah atau disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen penjabaran Renstra Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan per tahun. Dokumen Renja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah baik yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja memuat perencanaan tahunan dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan sasaran penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Renja. Renja merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Oleh karena itu setiap Perangkat Daerah harus merumuskan Renja secara transparan, responsif, efisiensi, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2024 disusun berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan sistematika penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun ini disusun dengan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan yang sudah

dicapai sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Madiun.

Penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun memuat program, kegiatan, alokasi dan kelompok sasaran dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan tahapan penyusunan berupa persiapan penyusunan Renja; persiapan Rancangan Awal Renja yang berpedoman pada Renstra DPMPTSP, hasil evaluasi Renja DPMPTSP tahun lalu dan evaluasi hasil Renja DPMPTSP tahun berjalan; penyusunan Rancangan Renja DPMPTSP; pembahasan Rancangan Renja DPMPTSP; perumusan Rancangan Akhir Renja DPMPTSP dan Verifikasi Rancangan Akhir Renja DPMPTSP.

Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2025 merupakan dokumen Perencanaan Kinerja untuk tahun kedua periode Renstra DPMPTSP Tahun 2024-2026 yang menjadi pedoman penyusunan Renja dan Anggaran DPMPTSP Tahun 2025 dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target Renstra dan RPD Kabupaten Madiun yang diselaraskan dengan pencapaian dan sasaran pembangunan nasional. Selain itu, penyusunan Renja DPMPTSP mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Madiun tahun 2025, Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota. Renja harus selaras dengan dokumen-dokumen perencanaan tersebut, utamanya yang berkaitan langsung dengan urusan penanaman modal.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2024 berdasarkan pada beberapa peraturan sebagai landasan atau rujukan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil

- Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2026;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Madiun Tahun 2005 – 2025;
 22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Madiun Tahun 2009 – 2029;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No 13 Tahun 2019;
 24. Peraturan Bupati Kabupaten Madiun Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun
 25. Peraturan Bupati Madiun Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026.
 26. Peraturan Bupati Madiun Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun adalah dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun yang mengacu pada Renstra DPMPTSP dengan maksud memberikan arah sekaligus sebagai acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara umum di lingkup DPMPTSP dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Maksud disusunnya Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2025 adalah untuk dijadikan dasar serta acuan bagi penyusunan program dan kegiatan tahunan, serta guna mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renja DPMPTSP adalah:

- a. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun.
- b. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun oleh DPMPTSP.
- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis dan Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun;
- d. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/kebijakan sesuai dengan kewenangannya.
- e. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika dokumen Renja Perubahan DPMPTSP Kabupaten Madiun tahun 2024 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun.
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kabupaten Madiun
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun
- 3.3 Program dan Kegiatan DPMPTSP Kabupaten Madiun

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP KABUPATEN MADIUN

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan.

Dalam rangka penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025, tahapan evaluasi pelaksanaan Renja dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan Renja pada tahun 2024. Evaluasi pelaksanaan Renja DPMPTSP disusun berdasarkan analisis kondisi objektif permasalahan yang timbul. Dari permasalahan tersebut kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan pada tahun 2025.

Sebagaimana termaktub dalam sistematika Renja Perangkat Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perlu dilakukannya evaluasi pelaksanaan dan capaian Renja tahun lalu. Evaluasi terhadap Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan. Penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2025 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

Evaluasi dilakukan terhadap capaian kinerja tujuan sasaran tahun 2024 dimana seluruh indikator kinerja telah melampaui target yang telah ditetapkan. Analisa capaian kinerja tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Evaluasi Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi atau Rekomendasi Perbaikan
1.	<i>Tujuan: Meningkatnya investasi daerah</i>					
	Nilai Realisasi Investasi	2,2 Triliun Rp	2,3 Triliun Rp	104,57	<p><u>Faktor Pendukung Keberhasilan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Iklim investasi di Kabupaten semakin membaik yang didukung oleh infrastruktur, ketersediaan lahan investasi, ketersediaan tenaga kerja, UMR yang rendah dll - Kondisi keamanan dan ketertiban umum yang kondusif - Intensifikasi kegiatan pengawasan dalam rangka peningkatan jumlah pelaporan LKPM - Pemberian kemudahan berusaha dan fasilitasi bagi calon investor - Dukungan dan kerjasama antara Pemkab Madiun dengan Pemprov maupun Pemerintah Pusat khususnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Percepatan penyusunan regulasi terkait tata ruang sehingga berdampak pada percepatan penyelesaian pemenuhan persyaratan dasar berusaha - Fasilitasi penyelesaian hambatan berusaha yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam rangka merealisasikan kegiatan usaha dengan berkoordinasi dengan K/L - Peningkatan kapasitas SDM Pengawasan sehingga bisa menjangkau lebih banyak pelaku usaha dalam rangka pembinaan dan pendampingan - Melakukan pengumpulan data,

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi atau Rekomendasi Perbaikan
					terkait penyediaan informasi prospek investasi Kabupaten Madiun bagi calon investor	<p>analisis serta penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah sehingga perkembangan iklim investasi akan sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Madiun</p> <p>- Strategi promosi investasi yang efektif dan inovatif perlu dikembangkan untuk lebih mendorong pertumbuhan investasi daerah. Selain penyelenggaraan pameran investasi dan forum bisnis, penyediaan sistem informasi digital</p>

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi atau Rekomendasi Perbaikan
					<p>Kendala</p> <ul style="list-style-type: none"> - RDTR belum tersusun di seluruh kecamatan sehingga belum dapat terintegrasi di OSS RBA dalam rangka penerbitan persyaratan dasar - Kurangnya kapasitas SDM sehingga kurang maksimal dalam melakukan kegiatan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi penyelesaian hambatan terhadap pelaku usaha. - Harga tanah di Kabupaten Madiun cenderung lebih mahal dibandingkan dengan Kabupaten lain - Potensi dan peluang investasi belum dirumuskan dengan spesifik sesuai arah kebijakan daerah dan kebutuhan calon investor. Kegiatan promosi dan kerjasama yang dilakukan juga belum cukup efektif dan efisien dalam menarik minat calon investor baik tingkat lokal, domestik, maupun mancanegara guna meningkatkan investasi di Kabupaten Madiun. 	<p>terkait potensi dan peluang investasi yang terintegrasi dengan RDTR dan peta LP2B akan mempermudah calon investor dalam membaca peluang investasi yang menguntungkan untuk dijalankan di Kabupaten Madiun</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan data bank tanah yang sesuai dengan ketentuan regulasi dan siap untuk ditawarkan kepada calon investor
2.	Sasaran : Meningkatkan kemudahan berusaha					

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi atau Rekomendasi Perbaikan
	Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha	86	93,25	108.43	<p><u>Faktor Pendukung Keberhasilan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan regulasi penunjang penanaman modal daerah diantaranya RTRW, RDTR, SOP Perizinan Berusaha dll - Penyederhanaan prosedur pelayanan perizinan berusaha - Kemudahan pelayanan perizinan secara online melalui implementasi aplikasi Online Single Submission (OSS RBA) dari BKPM, SIMBG, Siwali dan aplikasi perizinan lainnya - Peningkatan sarana prasarana pelayanan pada Mal Pelayanan Publik - Ketersediaan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat terkait layanan perizinan dan non perizinan pada beberapa media baik online maupun offline (website, media sosial, brosur, baliho, sosialisasi dll) <p><u>Kendala</u></p> <p>Unsur penilaian yang perlu dilakukan perbaikan adalah:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peningkatan sinergitas antara DPMPTSP dengan OPD teknis pendukung dalam penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal daerah untuk menciptakan kemudahan berusaha dan iklim investasi yang lebih baik terutama yang berkaitan dengan penyusunan regulasi dan implementasi SOP Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. ➤ Pengembangan aplikasi layanan perizinan non OSS sehingga semua perizinan dan non perizinan dapat diproses lebih cepat dan mudah secara online ➤ Meningkatkan jumlah peserta kediklatan terutama diklat teknis

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi atau Rekomendasi Perbaikan
					<ul style="list-style-type: none"> - Sumber Daya Manusia - Peningkatan Iklim Investasi 	<p>penanaman modal/PTSP/OSS tingkat lanjutan maupun sektoral serta diklat/kursus bahasa asing bagi pegawai di lingkup DPMPTSP Kabupaten Madiun.</p> <p>➤ Intensifikasi koordinasi formal antara Pemda dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur dalam rangka penyelesaian hambatan pelaksanaan kegiatan penanaman modal di daerah</p>

Pada tahun 2024 terdapat 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan 5 (lima) program fungsional urusan penanaman modal yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun. Dari sejumlah program tersebut keseluruhan target kinerjanya telah tercapai dengan sangat baik.

Tabel 2.2.
Evaluasi Capaian Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA					ANGGARAN		
	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor	Perusahaan	12500	25313	202,50%	17.401.000	15.195.350	87,32
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemberian insentif daerah dan kemudahan berusaha yang dilaksanakan	Persen	80	100	125%	17.401.000	15.195.350	87,32
Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman ModaL	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	dokumen	1	1	100%	5.410.000	3.673.350	67,90

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA					ANGGARAN		
	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	dokumen	5	5	100%	11.991.000	11.522.000	96,09
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peluang Investasi yang siap ditawarkan	Proyek	1	2	200%	98.600.000	96.886.600	98,26
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	100%	98.600.000	96.886.600	98,26
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor baru	Perusahaan	1000	7703	770,30%	59.190.000	56.224.000	94,99
Penyelenggaraan Promosi PM yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Jumlah Minat Penanaman Modal	Minat	9	5	55,56%	59.190.000	56.224.000	94,99

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA					ANGGARAN		
	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	dokumen	1	2	200%	59.190.000	56.224.000	95
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah perusahaan yang menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)	Perusahaan	150	475	316,67%	580.092.000	405.082.017	69,83
Pengendalian pelaksanaan PM yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota	Jumlah pelaku usaha yang dilaksanakan pengendalian terhadap kegiatan usahanya	Perusahaan	125	375	300%	580.092.000	405.082.017	69,83
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha	10	12	120%	76.451.800	8.172.500	10,69

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA					ANGGARAN		
	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	400	511	127,75%	331.868.676	285.039.517	85,89
Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	15	10	66,67%	171.771.524	111.870.000	65,13
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai SKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai	89	90,57	101,76%	165.973.000	165.161.500	99,5111

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA					ANGGARAN		
	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
Pelayanan Perizinan dan Non Perzinaan secara terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	Persen	80	82	102,50%	165.973.000	165.161.500	99,51
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelyanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	4000	2143	53,58%	59.970.000	59.597.700	99,3792
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	1100	2093	190%	106.003.000	105.563.800	99,59
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Nilai SKM atas Pelayanan Data dan Informasi	Nilai	86	86,05	100,06%	101.650.027	100.751.804	99,12

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA					ANGGARAN		
	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aksesibilitas pemanfaatan data informasi oleh pengguna layanan	Kali	20000	21409	107,05%	101.650.027	100.751.804	99,12
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	15	15	100%	101.650.027	100.751.804	99,12
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81	84,23	103,99%	30.186.445	30.184.500	99,99
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)	Nilai	86	86,13	100,15%	5.357.967.965	5.273.036.327	98,41
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	60,94	78,8	129,31%	13.204.316	13.132.500	99,46

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA					ANGGARAN		
	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun tepat waktu	Persen	90	90	100%	30.186.445	30.184.500	99,99
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	25	25	100%	30.186.445,32	30.184.500	99,99
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan	Persen	100	100	100%	3.775.890.967	3.728.833.892	98,75
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	25	25	100%	3.775.890.967	3.728.833.892	98,75
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya layanan administrasi umum	Persen	100	95	95%	514.452.536	506.561.081	98,47

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA					ANGGARAN		
	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	100%	13.517.757,29	13.515.950	99,99
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	8	8	100%	129.876.019,46	128.159.420	98,68
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	8	9	112,50%	32.670.963	32.557.100	99,65
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	7	7	100%	12.485.480	12.388.000	99,22
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	200	185	92,50%	312.698.000	306.808.111	98,12
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	5	5	100%	13.204.316	13.132.500	99,46

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA					ANGGARAN		
	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan	Persen	100	100	100%	118.564.942	115.850.000	97,71
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	15	15	100%	118.564.941,93	115.850.000	97,71
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi	Persen	100	100	100%	693.566.489	667.611.429	96,26
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100%	245.580.022	228.737.972	93,14
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100%	447.986.467	438.873.457	97,97
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Persen	100	95	95%	268.697.347	267.312.425	99,48

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA					ANGGARAN		
	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	12	12	100%	155.717.500	154.980.865	99,53
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	75	75	100%	40.979.847	40.671.560	99,25
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100%	72.000.000	71.660.000	99,53

a) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Pada tahun 2024, indikator *Jumlah Investor* mencapai 25.313 perusahaan atau tercapai 202,5% dari target. Terjadi peningkatan sejumlah 7709 Perusahaan yang terdiri dari pelaku usaha PMA dan PMDN. Hal ini menunjukkan bahwa iklim investasi di Kabupaten Madiun semakin baik terutama bagi pelaku UMKM. Peningkatan jumlah pelaku usaha ini juga diikuti oleh meningkatnya jumlah pelaporan LKPM yang berdampak pada peningkatan realisasi investasi serta pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Madiun. Kemudahan pelayanan perizinan berusaha menjadi faktor utama pelaku usaha untuk berinvestasi di Kabupaten Madiun.

b) Program Promosi Penanaman Modal

Indikator *Jumlah Investor Baru* memiliki capaian yang sangat luar biasa yaitu lebih dari 770%. Terdapat penambahan investor baru sejumlah 7709 perusahaan yang terdiri dari pelaku usaha skala mikro hingga skala besar baik PMDN maupun PMA. Dari data NIB tersebut dapat terjaring nilai rencana investasi sebesar 11,5 Triliun Rupiah. Tujuh diantaranya adalah pelaku usaha PMA dengan total nilai rencana investasi sebesar 10 Triliun rupiah. Di tahun 2024 DPMPTSP melaksanakan kegiatan promosi investasi diantaranya berupa pameran investasi. Salah satunya dengan mengikuti Apkasi Otonomi Expo 2024 yang diselenggarakan oleh APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) di Jakarta Convention Center, pada tanggal 10-12 Juli 2024. Sejumlah 416 perwakilan Pemerintah Kabupaten se-Indonesia hadir dalam perhelatan ini dengan membangun stand pameran di lokasi Hall A dan Hall B – JCC Senayan. Rangkaian kegiatan AOE 2024 ini meliputi kegiatan Bussiness Matching, Workshop Apkasi Procurement Network, Panggung Seni dan Budaya, Fashion Show Wastra Nusantara, Field Trip (tujuan Kampoeng Wisata Cinangneng, Cihideung Udik-Bogor). Rombongan tim Pemerintah Kabupaten Madiun merupakan gabungan dari perangkat daerah yang terdiri atas Bagian Pemerintahan Setda, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DPMPTSP) dan Dinas Komunikasi dan Informatika. Sedangkan pelaku usaha yang diikutsertakan pada kegiatan ini yaitu PT. Asia Prima Konjac dengan unggulan produk beras porang.

Dalam rangkaian kegiatan pameran tersebut, perwakilan DPMPTSP Kab. Madiun turut mengikuti kegiatan Bussiness Matching dengan membawa produk unggulan Kopi dan Coklat. Dalam forum tersebut, dihadiri para pelaku usaha dari sektor energi terbarukan sampai dengan agro. Sedangkan, pada rangkaian kegiatan hari kedua, juga turut mengikuti kegiatan workshop procurement network dengan menghadirkan narasumber dari LKPP, Kementerian Perindustrian dan salah satu pelaku usaha yang bergerak di bidang furniture.

Selain itu, DPMPTSP Kabupaten Madiun juga berpartisipasi dalam Pameran Jatim Fest pada tanggal 2-6 Oktober 2024, bertempat di Exhibition Hall Grand City Surabaya. Tujuan DPMPTSP mengikuti acara ini untuk mempromosikan potensi investasi yang dimiliki oleh Kabupaten Madiun kepada calon-calon investor di wilayah Surabaya, Gresik, Sidoarjo dan sekitarnya. Sebelum pelaksanaan pameran, DPMPTSP telah mengundang beberapa calon investor untuk dapat berkunjung langsung di booth DPMPTSP dengan harapan dapat memberikan layanan informasi dan konsultasi secara langsung terkait peluang investasi dan prosedur dalam memulai kegiatan berusaha di Kabupaten Madiun. Tercatat beberapa pelaku usaha yang menyempatkan untuk berkunjung di booth DPMPTSP di antaranya:

1. Calon investor industri mainan dimana mereka sedang mencari lahan dengan luasan 2 Ha. Sebelumnya mereka sudah menjajaki lahan di daerah Ngawi, namun lahan yang dimaksud termasuk dalam LSD dan LP2B, sehingga mencari lahan di daerah lain yang bebas LSD/LP2B. DPMPTSP membuka kesempatan untuk fasilitasi pendampingan survey lahan serta audiensi dengan Pj. Bupati dan OPD Teknis terkait.
2. Perwakilan Asprisindo Jawa Timur
3. PT. Dana Supra, Tbk,
4. PT. Global Way Indonesia2024

c) Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini memiliki indikator *Nilai SKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan* dengan capaian nilai 90,57 (Sangat Baik) dimana angka ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu senilai 89. Jumlah total responden yang mengikuti survey adalah sebanyak 403 responden. Hasil penilaian ini dapat dijadikan pedoman untuk penetapan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya dengan fokus melakukan perbaikan pada unsur-unsur yang nilainya lebih rendah dibandingkan unsur lainnya yaitu Waktu Penyelesaian, Prosedur dan Produk Layanan. Jenis perizinan/non perizinan yang prosesnya seringkali melebihi standar waktu layanan adalah Persyaratan Dasar (PKKPR, Izin Lingkungan, dan Persetujuan Bangunan Gedung/Sertifikat Laik Fungsi). Sebagian besar pelayanan PKKPR masih bersifat offline, dikarenakan RDTR Kabupaten Madiun yang telah terintegrasi dengan OSS hanya Kecamatan Pilangkenceng. Proses penerbitan PKKPR masih melewati tahap Rakor oleh Tim Pokja dan Forum Penataan Ruang yang melibatkan OPD Teknis hingga Sekretaris Daerah. Sedangkan perizinan lingkungan seringkali terkendala oleh lahan yang memiliki status Lahan Sawah Dilindungi. Masih terdapat banyak pelaku usaha yang mengeluhkan proses perizinan lingkungan yang harus melewati tahap alih fungsi lahan ke Kementerian ATR/BPN dimana seringkali berbiaya mahal karena menggunakan jasa konsultan. Untuk proses Persetujuan Bangunan Gedung terkendala personil Tim Teknis yang terbatas dan sistem SIMBG yang seringkali mengalami maintenance.

d) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Indikator *Jumlah perusahaan yang menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)* tercapai 475 Perusahaan dari target 150 perusahaan. Capaian luar biasa ini berdampak pada nilai realisasi investasi di tahun 2024 sebesar 2,3 Triliun Rupiah dimana telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 2,2 Triliun Rupiah. Dalam rangka pemenuhan target tersebut, DPMPSTP berupaya dengan intensifikasi kegiatan pengawasan lapangan dan meningkatkan layanan konsultasi pelaporan LKPM kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun online. Inovasi POS LKPM (Pendampingan On Site LKPM) menawarkan kombinasi jemput bola dengan

layanan digital (online) yang terintegrasi, menjadikan pelayanan lebih adaptif dan inklusif. Pendampingan tidak lagi menunggu pelaku usaha datang, tetapi juga aktif menjangkau pelaku usaha hingga ke wilayah pelosok. Metode ini menunjukkan perubahan paradigma pelayanan publik yang lebih proaktif, responsif, dan partisipatif.

e) Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini memiliki indikator kinerja *Nilai SKM atas Pelayanan Data dan Informasi* dengan capaian nilai 86,05. Angka ini merupakan hasil survey kepada masyarakat serta pengguna data dan informasi lainnya. Melalui pengelolaan data dan informasi yang akuntabel dan mudah diakses oleh masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pengambilan keputusan dalam kegiatan penanaman modal oleh berbagai pemangku kepentingan.

Perbandingan target dan realisasi tahun 2024 dengan target jangka menengah

Perbandingan target dan realisasi kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun tahun 2024 atau sampai dengan akhir tahun perencanaan jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis DPMPTSP Kabupaten Madiun periode 2024-2026 diuraikan pada Tabel 2.3. Tabel tersebut menggambarkan pencapaian tujuan dan sasaran kinerja DPMPTSP pada akhir periode pemerintahan di tahun 2026. Sepanjang tahun 2024, capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten telah berada dalam kategori sangat baik dikarenakan selalu telah melampaui target yang telah ditetapkan. Bahkan target sasaran di akhir periode pemerintahan tahun 2026 telah terlampaui. Data capaian ini dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dalam rangka penyusunan perencanaan kinerja di tahun tahun berikutnya dimana DPMPTSP diharapkan untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan sehingga akan berdampak positif pada peningkatan nilai realisasi investasi dan kualitas kemudahan berusaha Kabupaten Madiun.

Tabel 2.3.
Tingkat Kemajuan Capaian Tujuan dan Sasaran Strategis
DPMPPTSP Kabupaten Madiun

No.	Indikator Kinerja	Realisasi		Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
		2023	2024		
1.	<i>Tujuan: Meningkatnya investasi daerah</i>				
	Nilai Realisasi Investasi	1,8 Triliun Rp	2,3 Triliun Rp	2,9 Triliun Rp	79,31
2.	<i>Sasaran : Meningkatnya kemudahan berusaha</i>				
	Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha	83,05	93,25	90	103,61

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja DPMPPTSP tahun lalu dan capaian Renstra DPMPPTSP yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah disajikan pada Tabel 2.4. Adanya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, menyebabkan perubahan nomenklatur pada beberapa kegiatan, sub kegiatan beserta indikatornya. Sebagian data indikator kinerja pada tahun 2023 berbeda dengan data yang tertuang dalam Renstra DPMPPTSP Tahun 2024-2026 dikarenakan aplikasi SIPD telah mengakomodir data kinerja sub kegiatan sesuai regulasi terbaru. Sehingga beberapa capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tidak dapat diperbandingkan karena terdapat perbedaan indikator kinerja. Dari tabel 2.4 terlihat bahwa sebagian besar indikator kinerja Program dan Kegiatan telah melampaui target yang ditetapkan dalam periode akhir Renstra. Namun demikian, DPMPPTSP akan melakukan penyesuaian target di tiap tahunnya, disesuaikan dengan kondisi terkini agar kinerja DPMPPTSP Kabupaten Madiun lebih optimal dalam meningkatkan kualitas iklim investasi di Kabupaten Madiun.

Tabel 2.4
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMPTSP dan
Pencapaian Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun s/d Tahun 2024

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (2024)			Target program / kegiatan Tahun 2025 (berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9	10
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
PENANAMAN MODAL									
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor	14500 perusahaan	17604 perusahaan	12500 perusahaan	25313 Perusahaan	202,50%	29000 Perusahaan	26480 Perusahaan	183%
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemberian insentif daerah dan kemudahan berusaha yang dilaksanakan	100%	100%	80%	100%	125%	85%	100%	100%

Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	1 Dokumen	50%
Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	15 Dokumen	N/A	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	8 Dokumen	5 Dokumen	33%
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peluang Investasi yang siap ditawarkan	3 Proyek	N/A	1 Proyek	2 Proyek	200%	1 Proyek	1 Proyek	
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	1 Dokumen	100%
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	N/A	-	-	-	1 Dokumen	-	-
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai SKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	90	91,21	89	90,57	101,76	91	90,54	101%
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	85%	84%	80%	82%	103%	83%	85%	100%

Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	12000 Pelaku Usaha	3581 Pelaku Usaha	4000 Pelaku Usaha	2143 Pelaku Usaha	53,58%	2500 Pelaku Usaha	2897 Pelaku Usaha	24%
Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	3450 Pelaku Usaha	3932 Pelaku Usaha	1100 Pelaku Usaha	2093 Pelaku Usaha	190,27%	1150 Pelaku Usaha	532 Pelaku Usaha	76%
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	-	-
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah investor baru	3000 Perusahaan	10354 Perusahaan	1000 Perusahaan	7703 Perusahaan	770%	5000 Perusahaan	8875 Perusahaan	296%
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Minat Penanaman Modal	13 Minat	N/A	9 Minat	5 Minat	56%	5 Minat	7 Minat	54%

Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	6 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	200%	1 dokumen	3 dokumen	50%
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah perusahaan yang menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)	160 Perusahaan	290 Perusahaan	150 Perusahaan	475 Perusahaan	317%	475 Perusahaan	96 Perusahaan	60%
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang dilaksanakan pengendalian terhadap kegiatan usahanya	135 Perusahaan	78 Perusahaan	125 Perusahaan	375 Perusahaan	300%	375 Perusahaan	65 Perusahaan	48%
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	10 Kegiatan Usaha	N/A	10 Kegiatan Usaha	12 Kegiatan Usaha	120%	10 Kegiatan Usaha	6 Kegiatan Usaha	60%
Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	15 Kegiatan Usaha	N/A	15 Kegiatan Usaha	10 Kegiatan Usaha	67%	10 Kegiatan Usaha	17 Kegiatan Usaha	113%

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Nilai SKM atas Pelayanan Data dan Informasi	88	N/A	86	86,05	100%	87	-	-
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aksesibilitas pemanfaatan data informasi oleh pengguna layanan	20000	N/A	20000	21409	107%	20000 kali	5005 kali	110%
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	100%	15 dokumen	2 dokumen	-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82	83,49	81	84,23	103,99%	84,5	84,23	103%
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan	88	86,03	86	86,13	100%	87	86,13	98%
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	71,74	53,47	60,94	78,8	129%	79	78,8	110%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang	100%	25 orang	25 orang	100%

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya layanan administrasi umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	10%	10%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	-	3 paket	3 paket	100%	3 paket	-	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	5 paket	8 paket	8 paket	100%	5 paket	-	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	3 paket	8 paket	9 paket	113%	5 paket	-	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	7 paket	7 paket	100%	4 paket	-	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	135 Laporan	200 Laporan	185 Laporan	93%	200 Laporan	9 Laporan	4%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 dokumen	-	5 dokumen	5 dokumen	100%	5 dokumen	1 dokumen	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	3 Laporan	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	3 Laporan	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 unit	10 unit	15 unit	15 unit	100%	6 unit	15 unit	50%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	-	-	-	-	1 unit	-	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	95%	100%	100%	100%	100%	90%	90%	95%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 unit	10 unit	12 unit	12 unit	100%	12 unit	1 unit	8%

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 unit	60 unit	75 unit	75 unit	100%	75 unit	-	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	-	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun tepat waktu	95%	90%	90%	90%	100%	90%	90%	95%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25 dokumen	25 dokumen	25 dokumen	25 dokumen	100%	25 dokumen	9 dokumen	36%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja pelayanan yang disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Madiun dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang telah disesuaikan. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Madiun akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun pada dasarnya ditujukan untuk menyederhanakan birokrasi pelayanan perizinan dalam bentuk:

- a. Mempercepat waktu pelayanan dengan mengurangi tahapan-tahapan dalam pelayanan yang kurang penting (misalnya, waktu yang dihabiskan oleh pemohon izin untuk mendatangi berbagai instansi). Koordinasi yang lebih baik antar instansi yang terkait dengan perizinan juga akan sangat berpengaruh terhadap percepatan Layanan Perizinan.
- b. Menekan biaya pelayanan, selain pengurangan tahapan, pengurangan biaya juga dapat dilakukan dengan membuat prosedur pelayanan serta biaya resmi menjadi lebih transparan.
- c. Menyederhanakan persyaratan, dengan mengembangkan sistem pelayanan paralel akan ditemukan persyaratan-persyaratan yang tumpang tindih, sehingga dapat dilakukan penyederhanaan persyaratan. Hal ini juga berdampak langsung terhadap pengurangan biaya dan waktu.
- d. Mengkoordinir pengelolaan Mal Pelayanan Publik dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses berbagai jenis layanan publik di satu pintu mulai layanan perizinan, kependudukan dan pencatatan sipil, ketenagakerjaan, perpajakan, keimigrasian, BPJS, perbankan dan lain sebagainya.

DPMPTSP Kabupaten Madiun dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan Mal Pelayanan Publik. Untuk itu, DPMPTSP Kabupaten Madiun telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Rencana Kerja untuk kemudian dilaksanakan oleh Sekretariat serta Tim Kerja dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian target kinerja pada periode sebelumnya (Tahun 2019-2023) diukur dengan menggunakan berbagai indikator antara lain : Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator-indikator lainnya serta melihat realisasi yang telah digunakan selama periode anggaran sebelumnya sebagaimana disajikan pada Tabel 2.5

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Madiun untuk urusan penanaman modal pada lima tahun ke belakang menunjukkan tren positif dan peningkatan yang cukup signifikan terutama pada indikator minat investasi. Adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020-2021 nyatanya tidak menurunkan minat investor untuk membuka usaha di Kabupaten Madiun. Tingginya peningkatan minat investasi di Kabupaten Madiun mencerminkan iklim investasi yang semakin kondusif dan menjanjikan. Hal ini didukung oleh beberapa faktor di antaranya:

- (1) Kemudahan perizinan terutama dengan adanya OSS, pelaku usaha lebih mudah untuk memulai usaha khususnya UMKM
- (2) Jaminan investasi, mulai dari regulasi baik pusat maupun daerah, penyediaan lahan hingga pendampingan pemenuhan perizinan
- (3) Dukungan dan kerjasama antara Pemkab Madiun dengan Pemprov Jatim maupun Pemerintah Pusat khususnya terkait penyediaan informasi prospek investasi Kabupaten Madiun bagi calon investor.
- (4) Kabupaten Madiun memiliki sumber daya yang potensial untuk mendukung pengembangan investasi daerah baik dari segi infrastruktur, geografis, tenaga kerja serta potensi di beberapa sektor seperti pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan/UMKM.
- (5) Tersedianya infrastruktur yang memadai terutama adanya akses tol yang akan memudahkan aktivitas transportasi serta distribusi bahan baku dan hasil produksi
- (6) Tersedianya jumlah tenaga kerja yang memadai dengan UMR yang masih tergolong rendah

Pencapaian kinerja pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP sebagai organisasi perangkat daerah dalam urusan penanaman modal, disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP
Kabupaten Madiun
Tahun 2019-2023

No.	Indikator	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian (%)				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat /IKM	-	-	-	80	81	84	86	89	79,45	82,32	84,76	86,53	91,21	99,31	101,63	100,9	100,62	102,48
2.	Minat investasi (Rupiah)	-	-	-	300 M	310 M	1,4 T	1,5 T	1,6 T	644,87 M	1,29 T	1,98 T	4 T	7,36 T	214,96	416,26	141,93	266,86	460
3.	Realisasi Investasi (Rupiah)	-	-	-	450 M	500 M	900 M	1 T	1,1 T	632,74 M	889,81 M	1,1 T	1,8 T	1,8 T	140,61	177,96	123,97	182,31	163,64

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Pelayanan DPMPTSP

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun dimana disebutkan bahwa DPMPTSP Kabupaten Madiun mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan Mal Pelayanan Publik. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan daerah di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP;
- e. pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di atas maka kinerja pelayanan pada DPMPTSP Kabupaten Madiun difokuskan pada pelayanan kemudahan berusaha yang dapat meningkatkan realisasi investasi dan kualitas pelayanan publik.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat DPMPTSP

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun dihadapkan pada permasalahan-permasalahan antara lain :

1. Belum optimalnya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang mudah, cepat serta penuh kepastian (dari sisi waktu pelayanan dan biaya). Permasalahan ini harus diantisipasi dan ditemukan solusi permasalahannya, yaitu antara lain dengan :
 - a. Memastikan bahwa pelayanan perizinan dan nonperizinan diselenggarakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku
 - b. Tersedianya Media Informasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang *applicable* dan *accessible* sesuai dengan perkembangan teknologi
 - c. Tersedianya tenaga-tenaga pelayanan yang ramah, kompeten dan profesional;
 - d. Tersedianya data potensi dan data eksisting perizinan dan nonperizinan yang up to date, valid dan terukur.
2. Belum efektifnya peran Tim Teknis dalam proses pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun. Dalam mengatasi masalah ini maka harus dilakukan reposisi peran tim teknis dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan pada DPMPTSP Kabupaten Madiun serta meningkatkan efektifitas koordinasi antar tim teknis.
3. Belum tersedianya regulasi tata ruang RDTR yang terintegrasi dengan OSS di seluruh wilayah Kabupaten Madiun. Hal ini berdampak pada waktu pemrosesan persyaratan dasar sebagai langkah awal untuk melaksanakan kegiatan usaha.
4. Belum tersusunnya kebijakan pengembangan penanaman modal daerah yang lebih terarah sesuai dengan visi misi pembangunan Kabupaten Madiun sebagai pedoman dalam usaha meningkatkan minat dan realisasi investasi.

5. Potensi investasi Kabupaten Madiun belum optimal dipromosikan kepada calon investor sehingga jumlah investor besar yang menanamkan modalnya di Kabupaten Madiun masih relatif sedikit. Selain itu, iklim investasi belum sepenuhnya kondusif karena dasar hukum pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Madiun juga belum disusun.
6. Jumlah perusahaan yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) belum mencakup keseluruhan investor di Kab. Madiun. Hal ini berdampak pada kurang maksimalnya penilaian perkembangan investasi riil di lapangan. LKPM berperan penting untuk menilai realisasi investasi Kab. Madiun yang selanjutnya dipergunakan sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan investasi daerah yang lebih baik.

2.3.3 Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional

Sebagai upaya untuk mengawal pembangunan Kabupaten Madiun maka telah disusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 dimana di dalamnya telah ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai representasi tertinggi keberhasilan kinerja pembangunan Kabupaten Madiun. Tujuan pembangunan Kabupaten Madiun yang termaktub dalam RPD Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 yaitu.

TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH

- 1. Meningkatkan perekonomian daerah dengan mengembangkan sektor potensial dan mendorong masuknya investasi**
- 2. Menurunkan angka kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat**
- 3. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia**
- 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, profesional, dan akuntabel**

Tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu diharapkan mampu mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran daerah pada Tujuan 1 (satu) yaitu terkait pertumbuhan ekonomi. Salah satu indikator sasaran daerah untuk mendukung tujuan tersebut adalah Nilai Realisasi Investasi dimana capaian yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Madiun terus meningkat setiap tahunnya.

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan

Dalam menyelenggarakan urusan penanaman modal sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, DPMPTSP Kabupaten Madiun tak lepas dari tantangan dan peluang. Adapun tantangan yang dihadapi antara lain:

- 1) Kebijakan yang tidak konsisten dan tidak proporsional baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun
- 2) Semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap DPMPTSP Kabupaten Madiun untuk dapat menyelenggarakan pelayanan publik dengan mudah, cepat, murah dan tidak berbelit-belit
- 3) Negara-negara tetangga Asean memberikan insentif yang lebih menarik sehingga dapat meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya. Dibandingkan dengan negara-negara tetangga, insentif perpajakan di Indonesia relatif lebih rendah.
- 4) Adanya konflik kepentingan sektoral
- 5) Masih adanya persepsi negatif terhadap kelembagaan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
- 6) Fasilitas sarana prasarana yang masih perlu ditingkatkan dalam mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan publik
- 7) Belum optimalnya fungsi dan kapasitas Tim Teknis
- 8) Rawan akan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Sedangkan peluang yang ada, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberikan pedoman yang jelas bagaimana menyelenggarakan Pelayanan publik yang baik, professional dan akuntabel
- 2) Terbitnya Undang-undang Cipta Kerja yang ditindaklanjuti dengan terbitnya peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Dengan ada perubahan regulasi yang didukung oleh kemudahan berusaha akan meningkatkan aktivitas investasi di daerah
- 3) Meningkatnya minat pelaku usaha untuk berinvestasi di Kabupaten Madiun
- 4) Sinergitas yang baik antara DPMPTSP Kabupaten Madiun dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal penyusunan kebijakan penanaman modal daerah dan promosi potensi investasi Kabupaten Madiun
- 5) Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Timur Kabupaten Madiun dikategorikan dalam kawasan peruntukan industri di luar kawasan industri
- 6) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat serta semakin tingginya peran serta masyarakat di dalam penyelenggaraan perizinan merupakan hal yang dapat dimanfaatkan untuk akselerasi peningkatan kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun
- 7) Dukungan dan komitmen dari Perangkat Daerah Teknis terkait pemrosesan perizinan dan non perizinan dalam hal peningkatan kualitas pelayanan.

2.3.5 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2025

Identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh DPMPTSP Kabupaten Madiun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Percepatan pembangunan iklim investasi yang kondusif
2. Memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, penyederhanaan prosedur dan

mekanisme perizinan serta didukung kegiatan monitoring yang intensif untuk perbaikan berkelanjutan

3. Membangun layanan yang ramah dan profesional dengan pengembangan Sistem Informasi di semua pelayanan publik termasuk optimalisasi penggunaan TI yang terintegrasi bagi seluruh layanan publik
4. Pelaksanaan promosi investasi yang inovatif, efektif dan tepat sasaran termasuk digitalisasi potensi dan peluang investasi

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja Perubahan DPMPTSP Tahun 2025 merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2025. Renja Perubahan DPMPTSP Kabupaten Madiun dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan dalam rangka penetapan dan pencapaian target di tahun 2025. Urusan wajib penanaman modal yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Madiun terdiri dari 5 (lima) program teknis, 6 (enam) kegiatan, 7 (tujuh) sub kegiatan serta 1 (satu) program pendukung untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran. Secara lebih jelas, rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana pada rancangan Renja Perubahan yang disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan Awal P-RKPD Tahun 2025
DPMPSTP Kabupaten Madiun

No	P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PENANAMAN MODAL				6.752.248.638					6.752.248.638	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,5 (A)	1.800.300	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,5 (A)	1.800.300	
			Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan	87 (A)	6.039.917.844			Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan	87 (A)	6.039.917.844	
			Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	79	10.000.000			Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	79	10.000.000	
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun tepat waktu	90%	1.800.300	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun tepat waktu	90%	1.800.300	

No	P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Madiun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25 Laporan	1.800.300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Madiun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25 Laporan	1.800.300	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan	100%	4.452.248.638	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan	100%	4.452.248.638	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Madiun	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 orang	4.452.248.638	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Madiun	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 orang	4.452.248.638	Berkurang Rp 100.000.000 dari APBD
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Madiun	Persentase tersedianya layanan administrasi umum	100%	355.478.698	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase tersedianya layanan administrasi umum	100%	345.478.698	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Madiun	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Madiun	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	15.000.000	

No	P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Madiun	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	103.576.272	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Madiun	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	103.576.272	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Madiun	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	19.560.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Madiun	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	19.560.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Madiun	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	10.425.426	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Madiun	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	10.425.426	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Madiun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	196.917.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Madiun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	186.917.000	Berkurang Rp 10.000.000 dari APBD
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Madiun	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 dokumen	10.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Madiun	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 dokumen	10.000.000	
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan	100%	269.243.780	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan	100%	269.243.780	

No	P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Madiun	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	87.243.780	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Madiun	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	87.243.780	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Madiun	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	182.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Madiun	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	182.000.000	
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi	100%	752.506.728	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi	100%	752.506.728	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Madiun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	263.455.434	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Madiun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	263.455.434	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Madiun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	489.051.294	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Madiun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	489.051.294	

No	P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	90%	220.440.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	90%	230.440.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Madiun	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 unit	130.440.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 unit	140.440.000	Bertambah Rp 10.000.000 dari APBD
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Madiun	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 unit	40.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 unit	40.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Madiun	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	50.000.000	
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Jumlah Investor	29000 Perusahaan	43.951.900	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Jumlah Investor	29000 Perusahaan	44.285.200	

No	P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pemberian insentif daerah dan kemudahan berusaha yang dilaksanakan	85%	12.205.000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pemberian insentif daerah dan kemudahan berusaha yang dilaksanakan	85%	5.538.300	
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Madiun	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 dokumen	6.000.000	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Madiun	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 dokumen	2.000.000	Berkurang Rp 4.000.000 dari APBD 2025
	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Madiun	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	8 dokumen	6.205.000	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Madiun	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	8 dokumen	3.538.300	Berkurang Rp 11.546.700 dari APBD 2025
2.2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah Peluang Investasi yang siap ditawarkan	1 Proyek	31.746.900	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah Peluang Investasi yang siap ditawarkan	1 Proyek	38.746.900	

No	P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Madiun	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	31.746.900	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Madiun	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	38.746.900	Bertambah Rp 2.000.000 dari APBD 2025
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Jumlah Investor baru	5000 Perusahaan	120.613.800	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Jumlah Investor baru	5000 Perusahaan	128.229.500	
3.1	Penyelenggaraan Promosi PM yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota		Jumlah Minat Penanaman Modal	5 Minat	120.613.800	Penyelenggaraan Promosi PM yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota		Jumlah Minat Penanaman Modal	5 Minat	128.229.500	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	Luar Kab. Madiun	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 dokumen	120.613.800	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	Luar Kab. Madiun	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 dokumen	128.229.500	Bertambah Rp 21.495.700 dari APBD 2025
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Nilai SKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	91	184.949.000	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Nilai SKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	91	195.000.000	

No	P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perzinan secara terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota		Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	83%	184.949.000	Pelayanan Perizinan dan Non Perzinan secara terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota		Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	83%	195.000.000	
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Madiun	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2500 Pelaku Usaha	140.000.000	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Madiun	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2500 Pelaku Usaha	158.000.000	Bertambah Rp 68.000.000 dari APBD 2025

No	P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Madiun	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1150 Pelaku Usaha	35.000.000	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Madiun	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1150 Pelaku Usaha	35.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Madiun	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	9.949.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Madiun	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2.000.000	Berkurang Rp 7.949.000 dari APBD
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Jumlah perusahaan yang menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)	475 Perusahaan	250.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Jumlah perusahaan yang menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)	475 Perusahaan	232.000.000	

No	P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1	Pengendalian pelaksanaan PM yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota		Jumlah pelaku usaha yang dilaksanakan pengendalian terhadap kegiatan usahanya	375 Pelaku Usaha	250.000.000	Pengendalian pelaksanaan PM yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota		Jumlah pelaku usaha yang dilaksanakan pengendalian terhadap kegiatan usahanya	375 Pelaku Usaha	232.000.000	
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Madiun	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	10 Kegiatan Usaha	66.298.000	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab. Madiun	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	10 Kegiatan Usaha	66.298.000	
	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Madiun	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	10 Kegiatan Usaha	183.702.000	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Madiun	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	10 Kegiatan Usaha	165.702.000	Berkurang 18.000.000 dari APBD

No	P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Nilai kepuasan masyarakat atas layanan data dan informasi	87	101.015.794	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Nilai kepuasan masyarakat atas layanan data dan informasi	87	101.015.794	
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah aksesibilitas pemanfaatan data informasi oleh pengguna layanan	20000 kali	101.015.794	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah aksesibilitas pemanfaatan data informasi oleh pengguna layanan	20000 kali	101.015.794	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Madiun	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	15 dokumen	101.015.794	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Kab. Madiun	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	15 dokumen	101.015.794	

Berdasarkan rincian pada Tabel 2.5, terdapat beberapa perbedaan yang menjadi catatan antara Rancangan Awal RKPD dengan Rancangan Akhir Renja, diantaranya:

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp 100.000.000,- dibandingkan dengan APBD dikarenakan kelebihan anggaran untuk pembayaran gaji serta tunjangan bagi CPNS dan P3K pengadaan tahun 2025.
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan memperoleh tambahan alokasi anggaran sebesar Rp 10.000.000,- untuk belanja BBM. Tambahan ini merupakan efisiensi dari Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- c) Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik diberikan tambahan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000 untuk mengakomodir fasilitasi pembangunan Sekolah Rakyat serta Rp 18.000.000 untuk kegiatan inovasi MPP Jelajah Desa.
- d) Optimalisasi dilakukan pada Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dikarenakan Rancangan Perbup Pemberian Insentif dan Perda Penanaman Modal masih dalam tahap evaluasi Kemenkum Jatim sehingga belum dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan finalisasi dan penetapan.
- e) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota diberikan anggaran sebesar Rp 38.746.900 dimana sebelumnya terdapat pengurangan pada tahap P-RKPD. Hal ini merupakan tindak lanjut dari hasil koordinasi dengan BKPM dan DPMPTSP Provinsi dimana Kabupaten/Kota dapat menyusun NA RUPM sebagai langkah awal dalam penyusunan dokumen RUPM.
- f) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota diberikan tambahan alokasi anggaran sebesar Rp 21.495.700 untuk fokus pada promosi investasi digital. Hal ini berdampak pada pengurangan anggaran pada sub kegiatan Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota serta Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

- g) Efisiensi anggaran pada Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal sebesar Rp 18.000.000 dengan mengurangi anggaran Bantuan Transport bagi pelaku usaha.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Salah satu tahapan dalam penyusunan perencanaan, DPMPTSP Kabupaten Madiun juga melakukan penjaringan aspirasi masyarakat melalui Musrenbang Kabupaten dan Provinsi. Di dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut dilakukan pengkajian usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari OPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada DPMPTSP serta berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari berbagai sumber lainnya dengan tetap memperhatikan agenda prioritas pembangunan tahun 2025 yang tertuang di dalam RPD 2024-2026. Usulan dari pemangku kepentingan tersebut kemudian menjadi bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Usulan kegiatan dari masyarakat untuk tahun 2025 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Madiun akan diakomodir dalam program dan kegiatan Rencana Kerja, berupa:

- a) Intensifikasi pelayanan perizinan dan non perizinan di desa/kelurahan
- b) Sosialisasi terkait layanan Mal Pelayanan Publik lebih ditingkatkan
- c) Pengembangan aplikasi perizinan dalam meningkatkan kemudahan pelayanan perizinan
- d) Digitalisasi promosi investasi
- e) Pengawasan terhadap kegiatan usaha di Kabupaten Madiun lebih ditingkatkan
- f) Fasilitasi percepatan proses perizinan berusaha yang melibatkan kewenangan pusat
- g) Penyederhanaan proses penerbitan Persyaratan Dasar

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan RPJPN tahun 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN tahun 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Visi Misi Presiden tahun 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN tahun 2020-2025. Visi RPJMN tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup:

- 1) Pembangunan Sumber Daya Manusia: membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
- 2) Pembangunan Infrastruktur: melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
- 3) Penyederhanaan Regulasi: menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 (dua) undang-undang yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM;
- 4) Penyederhanaan Birokrasi: memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
- 5) Transformasi Ekonomi: melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RPJMN tahun 2020-2024 menetapkan 2 (dua) sasaran pembangunan dan 8 (delapan) arah kebijakan yang akan diwujudkan dalam rangka mendukung agenda pembangunan “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan”, dimana BKPM akan mendukung pencapaian sasaran pembangunan “Meningkatnya Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, dan Daya Saing Perekonomian” yang akan dicapai melalui arah kebijakan “Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi” dan strategi “Memperbaiki Iklim Usaha dan Meningkatkan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan”. Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi akan dilaksanakan melalui:

- 1) Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan serta kebijakan antar sektor dan wilayah;
- 2) Fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan, penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui Omnibus Law perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum

perpajakan, perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;

- 3) Reformasi ketenagakerjaan melalui upaya penciptaan iklim ketenagakerjaan yang kondusif yang didukung oleh hubungan industrial yang harmonis, penguatan collective bargaining, penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan, peningkatan keahlian dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan peran pemerintah daerah, serta peningkatan perlindungan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Perlindungan tenaga kerja akan diwujudkan melalui penerapan sistem perlindungan social universal bagi pekerja, membenahan sistem pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran, dan penerapan sistem pengawasan ketenagakerjaan secara efektif;
- 4) Penguatan kebijakan dan kelembagaan persaingan usaha; dan
- 5) Peningkatan kapasitas, kapabilitas serta daya saing BUMN, antara lain melalui pembentukan holding BUMN dan membuka pasar pada jaringan internasional.

Berdasarkan peluang dan permasalahan yang ada, baik dari aspek yang ada di dalam negeri secara nasional maupun regional serta global, dapat diperoleh isu strategis terkait penanaman modal. Isu strategis tersebut direspon dan disikapi dalam kerangka penyusunan Rencana Strategis Penanaman Modal BKPM Tahun 2020-2024. Adapun isu strategis tersebut adalah:

- 1) Melambatnya pertumbuhan penanaman modal,
- 2) Penanaman modal yang belum berkualitas, dan
- 3) Pelayanan penanaman modal yang belum sesuai dengan investor *needs*.

BKPM menetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2020-2024, yaitu:

- 1) Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal
- 2) Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

Dalam Penyusunan Renja DPMPSTSP Kabupaten Madiun Tahun 2024 mengacu pada kebijakan Nasional, serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Berpedoman pada hasil penyalarsan/sinkronisasi prioritas pembangunan Pusat dan Provinsi Jawa Timur serta memperhatikan saran dan masukan dari peserta Forum Konsultasi Publik,

maka prioritas pembangunan yang diprioritaskan sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3. 1
Korelasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Madiun

No.	Prioritas Nasional	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Madiun
1	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Meningkatnya realisasi investasi	Meningkatnya realisasi investasi
2	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/investor	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan
3	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani		

3.2 Tujuan dan sasaran Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun

Dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Madiun, tujuan dan sasaran Renja Perubahan DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2024 mengacu kepada tujuan yang terkait dengan urusan penanaman modal yaitu Tujuan I “*Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Pengembangan Sektor-sektor Unggulan Daerah*”. Sedangkan, tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Madiun dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran DPMPSTSP

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula Hitung	Target Tahun 2025
1.	Meningkatnya Investasi Daerah		Nilai realisasi investasi	Nilai realisasi investasi pada tahun berjalan (PMA/PMDN)	2,5 Triliun Rupiah
		Meningkatnya Kemudahan Berusaha	Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha	Hasil Penilaian Kinerja PTSP dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha per tahun	88

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam mengimplemetasikan tugas dan fungsinya sebagai unit pelayanan publik DPMPSTSP Kabupaten Madiun menyusun program dan kegiatan untuk tahun 2025 sebagai upaya untuk mendukung tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Madiun. Program dan kegiatan yang dilaksanakan DPMPSTSP Kabupaten Madiun pada tahun 2024 telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Program dan Kegiatan Renja
DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2025

Kode				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BEREKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.18				PENANAMAN MODAL
2.18.	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.18.	1	2.01.		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.18.	1	2.01.	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.18.	1	2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.18.	1	2.02.	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.18.	1	2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.18.	1	2.06.	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.18.	1	2.06.	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.18.	1	2.06.	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2.18.	1	2.06.	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2.18.	1	2.06.	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.18.	1	2.06.	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
2.18.	1	2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.18.	1	2.07.	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.18.	1	2.07.	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.18.	1	2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.18.	1	2.08.	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.18.	1	2.08.	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.18.	1	2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.18.	1	2.09.	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.18.	1	2.09.	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.18.	1	2.09.	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.18.	02.			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
2.18.	02.	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Kode				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
2.18.	02.	2.01	1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
2.18.	02.	2.01	3	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
2.18.	02.	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
2.18.	02.	2.02	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
2.18.	03.			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
2.18.	03.	2.01.		Penyelenggaraan Promosi PM yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota
2.18.	03.	2.01.	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota
2.18.	04.			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
2.18.	04.	2.01.		Pelayanan Perizinan dan Non Perzinan secara terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota
2.18.	04.	2.01.	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
2.18.	04.	2.01.	6	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
2.18.	04.	2.01.	7	Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
2.18.	05.			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
2.18.	05.	2.01.		Pengendalian pelaksanaan PM yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota
2.18.	05.	2.01.	4	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
2.18.	05.	2.01.	6	Pengawasan Penanaman Modal
2.18.	06.			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
2.18.	06.	2.01.		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.18.	06.	2.01.	2	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Setelah ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Perubahan maka disusunlah dokumen Rancangan Akhir Renja Perubahan DPMPTSP Kabupaten Madiun tahun 2025. Renja disusun untuk memudahkan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja DPMPTSP Kabupaten Madiun pada tahun 2025. Renja ini dibuat sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Madiun dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun.

Pendanaan program dan kegiatan didasarkan pada program dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Merealisasikan perencanaan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Tahun 2025 dan perkiraan Tahun 2026, maka ditetapkan anggaran untuk mendanai program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Madiun berdasarkan Indikator kerja dan sasaran kerja yang dijabarkan dalam pencapaian Renstra DPMPTSP berdasarkan pagu indikatif.

Berikut merupakan tabel yang menggambarkan rencana kerja dan pendanaan DPMPTSP Kabupaten Madiun pada tahun 2025 yang terdiri dari 1 (satu) program kesekretariatan dan 5 (lima) program teknis. Program kesekretariatan memiliki 6 (Enam) kegiatan 15 (lima belas) sub kegiatan dan program teknis memiliki 6 (Enam) kegiatan dan 10 (Sepuluh) sub kegiatan. Program dan kegiatan tersebut diuraikan sebagaimana Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DPMPSTP Kabupaten Madiun
Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BEREKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.752.248.638				7.087.306.486
2.18	PENANAMAN MODAL				6.752.248.638				7.087.306.486
2.18	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,5 (A)	1.800.300			84,75 (A)	5.000.000
			Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan	87 (A)	6.039.917.844			88 (A)	6.157.306.486
			Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	79	10.000.000			79,5	15.000.000
2.18	1 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun tepat waktu	90%	1.800.300			90%	5.000.000
2.18.	1 2.01. 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Madiun	25 Laporan	1.800.300	DBH	25 Laporan	5.000.000

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.18	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan		100%	4.452.248.638			100%	4.500.000.000
2.18.	1	2.02. 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Madiun	31 orang	4.452.248.638	DAU		32 orang	4.500.000.000
2.18	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya layanan administrasi umum		100%	345.478.698			100%	512.306.486
2.18.	1	2.06. 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Madiun	3 Paket	15.000.000	PAD		3 Paket	24.000.000
2.18.	1	2.06. 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Madiun	5 Paket	103.576.272	PAD		5 Paket	112.306.486
2.18.	1	2.06. 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Madiun	5 Paket	19.560.000	PBH		5 Paket	25.000.000
2.18.	1	2.06. 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Madiun	4 paket	10.425.426	DBH		4 paket	16.000.000
2.18.	1	2.06. 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar dan Dalam Kab. Madiun	200 Laporan	186.917.000	PAD		200 Laporan	320.000.000
2.18.	1	2.06. 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Madiun	5 dokumen	10.000.000	PBH		5 dokumen	15.000.000
2.18	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan		100%	269.243.780			100%	110.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.18.1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Madiun	6 unit	87.243.780	DBH		5 unit	55.000.000
2.18.1.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Madiun	1 unit	182.000.000	DAU		1 unit	55.000.000
2.18.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi		100%	752.506.728			100%	800.000.000
2.18.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Madiun	12 laporan	263.455.434	PAD		12 laporan	300.000.000
2.18.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Madiun	12 laporan	489.051.294	PAD		12 laporan	500.000.000
2.18.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara		90%	230.440.000			90%	250.000.000
2.18.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Madiun	12 unit	140.440.000	PBH		12 unit	150.000.000
2.18.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Madiun	75 unit	40.000.000	PBH		75 unit	50.000.000
2.18.1.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Madiun	1 unit	50.000.000	DAU		1 unit	50.000.000

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
2.18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor		29000 Perusahaan	44.285.200			33000 Perusahaan	260.000.000	
2.18	02	2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemberian insentif daerah dan kemudahan berusaha yang dilaksanakan		85%	5.538.300		85%	110.000.000	
2.18.	02.	2.01	1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Madiun	2 dokumen	2.000.000	DBH	1 dokumen	80.000.000
2.18.	02.	2.01	3	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Kab. Madiun	8 dokumen	3.538.300	DBH	10 dokumen	30.000.000
2.18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peluang Investasi yang siap ditawarkan		1 Proyek	38.746.900		1 Proyek	150.000.000
2.18.	02.	2.02	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Madiun	1 dokumen	38.746.900	DBH	1 dokumen	70.000.000
2.18.	02.	2.02	4	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Madiun	-	-		1 dokumen	80.000.000
2.18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor baru		5000 Perusahaan	128.229.500		5000 Perusahaan	150.000.000
2.18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi PM yang	Jumlah Minat Penanaman Modal		5 Minat	128.229.500		5 Minat	150.000.000

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.18.	03.	2.01.	2									
2.18	04											
2.18	04	2.01										
2.18.	04.	2.01.	6									
2.18.	04.	2.01.	7									

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.18.	04. 2.01. 5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Madiun	1 Dokumen	2.000.000	PBH		2 Dokumen	10.000.000
2.18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah perusahaan yang menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)		475 Perusahaan	232.000.000			500 Perusahaan	250.000.000
2.18	05 2.01	Pengendalian pelaksanaan PM yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota	Jumlah pelaku usaha yang dilaksanakan pengendalian terhadap kegiatan usahanya		375 perusahaan	232.000.000			400 perusahaan	250.000.000
2.18.	05. 2.01. 4	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Madiun	10 Kegiatan Usaha	66.298.000	DAU		10 Kegiatan Usaha	50.000.000
2.18.	05. 2.01. 6	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kab. Madiun	10 Kegiatan Usaha	165.702.000	DAU		15 Kegiatan Usaha	200.000.000

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Nilai kepuasan masyarakat atas layanan data dan informasi		87	101.015.794			87,25	100.000.000
2.18	06 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aksesibilitas pemanfaatan data informasi oleh pengguna layanan	Kab. Madiun	20000 kali	101.015.794			20000 kali	100.000.000
2.18.	06. 2.01. 2	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kab. Madiun	15 dokumen	101.015.794	PBH		15 dokumen	100.000.000

BAB V PENUTUP

Renja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah. Di samping itu Renja juga berfungsi untuk meninjau kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya. Renja Perubahan DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun tahun 2024-2026 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Madiun tahun 2025.

Penyusunan Renja DPMPTSP sebagai upaya mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun. Pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis, baik dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun maupun di Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan DPMPTSP sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun di dalam Renja Perubahan Tahun 2025 ini serta dapat mejadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan peningkatan realisasi investasi dan di Kabupaten Madiun.

Madiun, 20 Juni 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MADIUN,



ARIK KRISDIANANTO, S.STP, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19750925 199602 1 003

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA		
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD	APBD	RKPD PERUBAHAN 2025				
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-	10 Kegiatan Usaha.	0,00	66.298.000,00	66.298.000,00	66.298.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Kegiatan Usaha.	50.000.000,00
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha										
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	339.742.392,00	0,00	0,00	-339.742.392,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal										
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	10 Kegiatan Usaha	10 Kegiatan Usaha	171.028.294,00	183.702.000,00	183.702.000,00	12.673.706,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	15 Kegiatan Usaha	200.000.000
6,	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Nilai SKM atas Pelayanan Data dan Informasi Nilai kepuasan masyarakat atas layanan data dan informasi	87 Nilai	87 Nilai	101.014.794,00	101.015.794,00	101.015.794,00	-101.014.794,00		87,25 Nilai	100.000.000
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aksesibilitas pemanfaatan data informasi oleh pengguna layanan Jumlah pemberian layanan data informasi yang dilaksanakan	20000 kali	20000 kali	101.014.794,00	101.015.794,00	101.015.794,00	1.000,00			100.000.000
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik										
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	15 Dokumen	15 Dokumen	101.014.794,00	101.015.794,00	101.015.794,00	1.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	15 Dokumen	100.000.000
J U M L A H						6.105.982.967,00	6.802.248.638,00	6.752.248.638,00	121.348.717.843,36			7.087.306.486,00



 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ANIK KRISDIANANTO, S.STP, M.H.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19750925 199602 1 003